|  |  |
| --- | --- |
| Logo_Kemenkumham | **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  **REPUBLIK INDONESIA**  **KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT**  Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Telepon: (0370) 7856244  Laman: ntb.kemenkumham.go.id, Surel: kanwilntb@kemenkumham.go.id |

**HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK**

1. **UMUM**

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pada ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yaitu kewenangan menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kewenangan untuk menyusun instrumen hukum dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal senada diatur pula dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah.

Peraturan daerah memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan peraturan daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan/atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengenai aspek substansi dan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Program Sekolah Penggerak harus sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 173 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak ini merupakan program kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan Pemerintah Daerah yang dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak merupakan peraturan kebijakan penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang tidak bisa digunakan sebagai dasar pembentukan peraturan daerah. Suatu peraturan kebijakan sebagai suatu instrument pemerintahan yang lahir dari diskresi tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membuat peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

Oleh karena itu, pengaturan terkait pelaksanaan Program Sekolah Penggerak tidak dibuat dalam bentuk peraturan daerah, melainkan dilaksanakan dengan membuat Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, seperti halnya yang dilakukan di Provinsi Lampung.

**Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Program Sekolah Penggerak ini, antara lain:**

1. Kewenangan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Program Sekolah Penggerak

Dilihat dari konsiderans menimbang, rancangan peraturan daerah ini bersifat atributif. Sebagaimana dimuat butir 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis dan yuridis. Namun dalam konsiderans rancangan peraturan daerah ini belum memuat ketiga unsur tersebut. Oleh karena itu, rumusan konsiderans perlu diubah.

1. Rumusan Dasar Hukum

* Pada prinsipnya, dasar hukum hanya memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
* Dasar hukum pembentukan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaiamana diatur butir 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
* Beberapa peraturan perundang-undangan tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar hukum.

1. Rumusan Ketentuan Umum

Perlu diperhatikan urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagaimana dinyatakan butir 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

* Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
* Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
* Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian diatasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

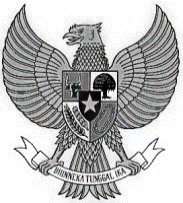
1. Substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Program Sekolah Penggerak

* Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal sebagaimana dinyatakan butir 243 huruf f Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. **KHUSUS**

Catatan:

* Font merah, artinya adanya perubahan pada kata atau rumusan.
* Font biru, artinya adanya penambahan kata atau rumusan.
* Font highlight kuning, artinya adanya catatan terhadap rumusan.



BUPATI SUMBAWA BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR ... TAHUN …

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. ~~bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perlu menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak sebagai modal satuan pendidikan bermutu melalui pembaruan pembelajaran;~~ 2. ~~bahwa untuk mewujudkan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagai panduan pelaksanaannya di masing-masing satuan pendidikan;~~ 3. ~~bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Sekolah Penggerak;~~   Catatan:  Rumusan konsiderans disarankan diubah menjadi:   1. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang berkualitas; 2. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perlu menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak sebagai modal satuan pendidikan bermutu melalui pembaruan pembelajaran; 3. bahwa untuk mewujudkan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud huruf b, perlu disusun mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagai panduan pelaksanaannya di satuan pendidikan; 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Sekolah Penggerak; |
| Mengingat | : | * + 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;     2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);     3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);     4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);     5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor -, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);     6. ~~Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);~~     7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);     8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);     9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala SEkolah, dan Pengawas SEkolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);     10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak;     11. ~~Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 162/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak;~~   Catatan:  Keputusan Menteri tidak bisa dijadikan dasar pembentukan suatu peraturan. |
|  |  |  |
| Dengan Persetujuan Bersama  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN SUMBAWA BARAT  dan  BUPATI SUMBAWA BARAT  MEMUTUSKAN: | | |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK. |

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Bupati Sumbawa Barat dan Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat yang melaksanakan tugas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Kemendikbudristek adalah Kementerian yang menangani urusan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
6. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. ~~Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (eam) tahun.~~
10. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang penddikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu keatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagian lanjutan dari SD.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Kepala Satuan Pendidikan adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), kelompok bermain (KB), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).
15. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada PAUD dan jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
16. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
17. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.
18. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur mengeni managemen penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak bagi satuan pendidikan di wilayah ~~Kabupaten Sumbawa Barat~~ Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup ~~managemen~~ penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

1. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
2. penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Pengerak;
3. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Pemerintah Daerah;
4. pelaksana kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan;
5. evaluasi; ~~dan~~
6. peran serta masyarakat;
7. penghargaan; dan
8. pendanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Program Sekolah Penggerak bertujuan:

1. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
2. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
3. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
4. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah maupun Pemerintah.

Pasal 5

1. Sasaran penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak meliputi:
   1. pendidik PAUD;
   2. kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP; dan
   3. pengawas sekolah/penilik.
2. Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya di lokasi yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PROGRAM

SEKOLAH PENGGERAK

Bagian Kesatu

Sosialisasi Penyelenggaraan Program

Sekolah Penggerak

Pasal 6

1. Sosialisasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan oleh ~~Kepala Daerah~~ Bupati dan Dinas kepada para kepala satuan pendidikan.
2. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
3. memberikan pemahaman dan mempublikasikan Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan pendidikan; dan
4. mendapatkan informasi dan data kesiapan dari satuan pendidikan untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagai bahan pengajuan ke Kemendikbudristek.

Bagian Kedua

Penetapan Satuan Pendidikan Sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak

Pasal 7

1. Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan melalui proses seleksi;
2. Proses seleksi kepala satuan pendidikan dilaksakan pada jenjang;
3. PAUD;
4. SD; dan
5. SMP.
6. Kepala satuan pendidikan pada masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kepempimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar yang mewakili keberagaman.
7. Kepala satuan pendidikan yang dapat mengikuti seleksi Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kompetensi berdasarkan model kompetensi kepempimpinan sebagai berikut:
8. mengembangkan diri dan orang lain;
9. memimpin pembelajaran;
10. memimpin manjemen satuan pendidikan; dan
11. mempimpin pengembangan satuan pendidikan.

Pasal 8

1. Persyaratan bagi kepala satuan Pendidikan yang dapat mengikuti seleksi Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), antara lain:
2. memiliki sasa masa tugas sebagai kepala satuan Pendidikan sekurang-kurangnya 1 kali masa tugas;
3. terdaftar dalam data pokok Pendidikan;
4. menyampaikan surat pernyataan dengan format yang diunduh dari apliasi Program Sekolah Penggerak;
5. menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh kepala satuan Pendidikan yang bersangkutan;
6. menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala satuan Pendidikan yang besangkuatan tidak akan mengundurkan diri apabila terpilih sebagai kepala satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak paling sedikit 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
7. melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (jika dinyatakan lulus pada seleksi tahap 2);
8. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
9. tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditandangani oleh:
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat yang ditunjuk bagi kepala satuan Pendidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diketahui oleh ketua Yayasan/badan perkumpulan di wilayahnya atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

1. Seleksi kepala satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
2. Pemerintah daerah mengadakan sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi;
3. kepala satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak melaksanakan pendaftaran setelah Kemendikbudristek membuka proses pendaftaran;
4. kepala satuan Pendidikan mendaftar pada laman *website* yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti 2 (dua) tahap proses seleksi berdasarkan model komptensi kepemimpinan; dan
5. Pemerintah Daerah mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan Pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan hasil penilaian yang lolos sleksi kepada tim panel yang terdiri atas unit pelaksana teknis Kemndikbudristek dan Pemerintah Daerah.
6. Tahapan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
7. seleksi tahap I melalui kegiatan:
8. melengkapi dokumen admnistrasi;
9. membuat daftar Riwayat hidup; dan
10. menulis esai.
11. seleksi tahap II meliputi simulasi mengajar dan wawancara.
12. Tahapan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kemendikbudristek.

Pasal 10

1. Pemimpin unit utama yang membidangai PAUD, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah Kemendikbudristek menetapkan satuan Pendidikan yang lulus seleksi sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
2. Bupati menetapkan satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak dengan Surat Keputusan berdasarkan keputusan Kemendikbudristek sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat dalam data pokok Pendidikan sebagai satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak.

Pasal 11

1. Kepala satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berubah apabila mengalami kondisi sebagai berikut:
2. mutasi/rotasi kepala satuan Pendidikan antar-satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak;
3. promosi jabatan;
4. sakit dan tidak dapat menjalankan tugas selama paling sedikit 6 (enam) bulan secara terus-menerus;
5. meninggal dunia; dan
6. pensiun dini.
7. Kepala satuan epndidikan atau wakilnya yang mengalami kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor ke Dinas, selanjutnya Dinas mengusulkan calon pengganti kepala satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak kepada pemimpin unit utama yang emmbidangi guru dan tenaga kependidikan Kemendibudristek;
8. Calon pengganti kepala satuan Pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
9. calon kepala satuan penddiikan pengganti merupakan kepala satuan Pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak;
10. apabila kepala satuan Pendidikan cadangan calon kepala sekolah penggerak sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diganti dari guru penggerak;
11. apabila guru penggerak sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada, maka dapat diangkat plt. Kepala satuan pendidikan dari unsur anggota komite pembelajaran pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan ditetapkannya kepala satuan Pendidikan definitif; dan
12. apabila kondisi sebaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi, maka calon kepala sekolah penggerak dapat diangkat dari kepala satuan pendidikan lain yang bukan sekolah penggerak sepanjang telah mengikuti pelatihan komite pembelajaran.
13. Pemerintah Daerah mengusulkan calon pengganti kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak kepada pemimpin unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak

Pasal 12

1. Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
2. Sosialisasi kebijakan di wilayahnya dan pemangku kepentingan lainnya;
3. penyusunan kebijakan atau regulasi terkait Program Sekolah Penggerak;
4. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
5. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuku penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
6. identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelengaraan Program Sekolah Penggerak;
7. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
8. berkoordinasi dengan Kemndikbudristek dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.
9. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan:
10. Pertemuan baik secara daring maupun luring;
11. membuat surat edaran terkait Program Sekolah Penggerak; dan
12. penyebaran informasi melalii berbagai media.
13. Dalam pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah diberikan pendampingan oleh Kemendikbudristek berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

1. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga satuan Pendidikan;
2. Penyiapan kebijakan satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
3. Penyiapan guru atau pendidikan PAUD, kepala satuan Pendidikan, dan tenaga kependidikan yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
4. Melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
5. Melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak;
6. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan; dan
7. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan komtensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila.

Pasal 14

1. Pelaksanaan pelatihan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, diperuntukkan bagi:
2. kepala satuan penddiikan;
3. pengawas sekolah atau penilik; dan
4. Pendidik atau pendidik PAUD.
5. Pelatihan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
6. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah atau penilik, dan guru atau pendidik paud; dan
7. pendamping intensif (*coaching*) di satuan pendidikan.
8. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Program Sekolah Penggerak pada satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Kemendikbudristek yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 15

1. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan Pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
2. Platform teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
3. platform teknologi bagi guru;
4. platform teknologi bagi sumber daya satuan pendidikan; dan
5. platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan.
6. Platform teknologi bagi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
7. platform teknologi untuk pembelajaran, guna membantu pendidik atau pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
8. platform teknologi untuk profil pendidik dan pengembangan komptensi, guna membantu kegiatan pengelolaan profil pendidik serta mendukung kegiatan pengembangan komptensi pendidik yang dilakukan melalui media digital.
9. Platform teknologi bagi sumber daya satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan utnuk membantu kepala satuan pendidikan, bendahara, dan pengawas atau penilik dalam mengelola sumber daya satuan pendidikan dengan lebih tepat, mudah, dan efisien;
10. Platform teknologi untuk profil Pendidikan dan rapor Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertujuan membantu kepala satuan Pendidikan dan pengawas atau penilik Menyusun peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Pasal 16

1. Dalam hal satuan Pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi, Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi;
2. Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam penyelarasan pemanfaatan platform teknologi yang telah digunakan oleh satuan pendidikan dengan platform teknologi dalam penyelenggaraan platform teknologi;
3. Pemanfaatan platform teknologi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Teknik yang ditetapkan oleh Sekrtaris Jenderal Kemendikbudristek.

Pasal 17

Pembelajarani dengan paradigma baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, dilakukan melalui:

1. Penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan utnuk mengembangkan dan menguatkan komptensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
2. Penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;
3. Penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan Pendidikan dan peserta didik; dan
4. Pembelajaran melalui projek untuk penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila.

Bagian Keempat

Evaluasi Penyelenggaraan

Program Sekolah Penggerak

Pasal 18

1. Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak bertujuan;
2. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
3. memberi umpan balik untuk meperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
4. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.
5. Evaluasi Program Sekolah Penggerak dilaksanakan oleh Kemendikbudristek dan Pemerintah Daerah;
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaran Program Sekolah Penggerak akan berkoordinasi dan melibatkan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

1. Evaluasi Program Sekolah Penggerak dilaksakan melalui tahapan:
2. awal program;
3. pertengahan program; dan
4. akhir program
5. Tahapan awal program sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
6. melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolak ukur untuk melihat dampak program;
7. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar;
8. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.
9. Tahap pertengahan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
10. melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan penilaian kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
11. penilaian penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui survei wawancara, dan observasi;
12. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar;
13. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.
14. Tahap akhir Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
15. penilaian kienerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak;
16. penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada PAUD paling sedikit menggunakan survei tentnag kualitas lingkungan belajar; dan
17. penilaian kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, surta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Pasal 20

1. Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, Pemerintah Daerah menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah;
2. Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen, dan perbukuan Kemendikbudristek.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

1. Masyarakat dan/atau organisasi pemerhati pendidikan dapat berperan serta dalam Program Sekolah Penggerak.
2. Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. Membantu terselenggaranya Program Sekolah penggerak baik melalui tenaga, pikiran, dan/atau sumbangan sarana prasarana; dan
   2. melakukan pengawasan terhadap Program Sekolah Penggerak .
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk surat pengaduan atas terjadi penyimpangan dalam Program Sekolah Penggerak.
4. Surat aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada Dinas untuk dilakukan pemerikisaan.

BAB VI

PENGHARGAAN

Pasal 22

1. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penyelenggara Program Sekolah Penggerak, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki komitmen tinggi dan berhasil dalam menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 23

### Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan oleh Dinas.

### BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasal dari:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di …

Pada Tanggal ... 20 …

BUPATI SUMBAWA BARAT

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di …

pada tanggal …

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN… NOMOR …

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR… TAHUN…

TENTANG

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

* 1. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun sebagai langkah awal Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan pembentukan regulasi sebagai pedoman hukum dalam persiapan dan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di Kabupaten Sumbawa Barat. Program Sekolah Penggerak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak yang mendukung program Pemerintah Pusat.

Upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia perlu senantiasa memperhatikan perubahan masyarakat dan dinamika global. Untuk itu, Program Sekolah Penggerak adalah langkah untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia pada satuan pendidikan yang selanjutnya melaksanakan penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

* 1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR...